

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bencana alam dengan frekuensi tertinggi dan berdampak destruktif di dunia, dengan kerugian signifikan yang menjangkau ke berbagai sektor kehidupan (Hu et al., 2018). Di Indonesia, banjir menyumbang lebih dari 40% total bencana nasional (BNPB, 2025b), di mana tren banjir terus menunjukkan peningkatan baik dari segi frekuensi maupun luas wilayah terdampak (Lasaiba & Leuwol, 2024). Setiap tahunnya, kerugian yang ditimbulkan banjir di Indonesia mencapai Rp30 – 45 triliun (OECD, 2023). Lebih lanjut, Kajian Risiko Bencana Indonesia (2023) memperkirakan sekitar 113 juta jiwa berpotensi terdampak banjir dengan nilai aset terpapar melebihi Rp900 triliun. Kondisi ini menunjukkan betapa banjir mampu mengguncang roda ekonomi Indonesia dan berakibat signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Jakarta termasuk ke dalam wilayah yang rentan terhadap banjir. Posisinya yang terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa dan merupakan dataran rendah di antara hulu sungai dan pesisir membuat kota ini menghadapi risiko banjir yang tinggi (Taryana et al., 2022). Selain itu, Jakarta tergolong sebagai dataran aluvial yang hampir seluruhnya datar, dengan selisih ketinggian 25 meter dari titik tertinggi ke titik terendah, dan dilintasi 13 sungai termasuk Sungai Ciliwung yang bermuara ke Teluk Jakarta. Kondisi ini menjadikan wilayah Jakarta rawan terhadap sedimentasi dari hulu dan aliran balik air laut pasang. Di sisi lain, curah hujan tahunan yang mencapai 1.700 – 3.000 mm di wilayah hulu semakin membebani sistem drainase yang kapasitasnya terbatas (UNFCCC TEC, 2023).

Dengan kondisi geografis seperti itu, maka tak mengherankan apabila Jakarta memiliki rekam jejak banjir yang panjang dan kompleks. Sejak masa kolonial Batavia, wilayah Jakarta telah mengalami beberapa banjir besar seperti

pada tahun 1699, 1714, 1854, dan 1918, yang dipicu oleh sedimentasi vulkanik, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan perubahan tata guna lahan (Hermawan, 2021; Silver, 2012). Pola ini terus berlanjut pasca kemerdekaan, mulai dari 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, 2016, 2020, dan 2025 (Kusumanto et al., 2022; Alam et al., 2025). Dari sekian banyak peristiwa, banjir tahun 2007 menjadi salah satu yang terparah, di mana banjir mengakibatkan tiga perempat wilayah Jakarta terendam, 79 orang meninggal, 500.000 orang mengungsi, dan kerugian mencapai sekitar Rp9 triliun (Kusumanto et al., 2022).

Rangkaian banjir besar yang terus berulang di Jakarta menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan ekstrim atau kondisi geografis. Linde & Bjarne (2025) mengemukakan bahwa banjir di Jakarta juga diperparah oleh urbanisasi yang masif, penurunan muka tanah, keterbatasan sistem drainase, lemahnya tata kelola kota, hingga dampak perubahan iklim yang kian nyata. Selain itu, alih fungsi lahan yang mengurangi area resapan air, kapasitas pompa yang terbatas, dan kenaikan muka air laut turut memperburuk kondisi banjir (Eldi, 2020; BRIN, 2025). Lebih lanjut, perilaku masyarakat seperti membuang sampah ke sungai dan penebangan hutan juga berkontribusi memperparah kondisi yang ada (Wirawan & Nandari, 2020).

Banjir besar di Jakarta meninggalkan jejak kerugian yang meluas, mulai dari terganggunya transportasi, lumpuhnya fasilitas publik, hingga menurunnya aktivitas ekonomi. Peristiwa 2020 misalnya, banjir merusak banyak infrastruktur publik seperti Puskesmas dan tempat ibadah, menutup Bandara Halim Perdana Kusuma, dan memaksa ribuan warga mengungsi (Ginting, 2020). Secara ekonomi, kerugian tahunan diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun dan diproyeksikan melonjak hampir lima kali lipat menjadi Rp10 triliun pada tahun 2035 (Al Hamasy, 2024; Nurjoni, 2024). Kerugian tersebut mencakup kerugian material dan nonmaterial, termasuk hilangnya produktivitas lahan, rusaknya jasa ekosistem, serta terhentinya kegiatan sosial dan pendidikan (Al Hamasy, 2024). Lebih lanjut, sekolah ditutup berhari-hari (Ariefiana, 2020), harga kebutuhan pokok melonjak, dan jutaan warga kehilangan mata pencaharian sementara (Mutmainah, 2024) menunjukkan dampaknya yang menjangkau hampir ke semua sektor.

The World Bank (2019) menegaskan bahwa 72,7% wilayah Jakarta termasuk daerah rawan banjir dan diperkirakan akan terus meningkat di masa depan. Penurunan muka tanah dengan rata-rata 7,5 cm/ tahun, ditambah kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, menjadikan Jakarta sebagai kota dengan laju penurunan permukaan tanah tercepat di dunia. Kini, sekitar 40% wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut (UNFCCC TEC, 2023) dengan risiko banjir diproyeksikan mengalami peningkatan sebanyak 111% hingga 362% pada tahun 2030 (Budiyo et al., 2016) dan melonjak hingga 402% pada tahun 2050 (Januriyadi et al., 2018). Sejumlah kajian bahkan memprediksi Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 (Prihartini & Sari, 2022; CNBC Indonesia, 2022 Burhani, 2023)

Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat Jakarta hidup dalam aktivitas ekonomi dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai kota dengan kontribusi ekonomi tertinggi di Indonesia, Jakarta menopang 16,77% dari perekonomian yang membuat hampir seluruh aktivitas strategis negara berpusat di sini, termasuk pusat bisnis, perdagangan, dan pemerintahan (Sofyan et al., 2024). Selain itu, Jakarta merupakan kota terpadat penduduk dengan kepadatan sebesar 16.165 jiwa/ km² (BPS, 2025). Kedua faktor ini berpotensi memperluas dampak yang ditimbulkan dari banjir di Jakarta. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bencana menjadi penting guna meminimalkan risiko banjir yang terus meningkat.

Kesiapsiagaan bencana merupakan kapasitas dan pengetahuan yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi tanggap darurat profesional, masyarakat, dan individu untuk mengantisipasi dan merespons secara efektif dampak dari peristiwa atau kondisi bahaya yang mungkin terjadi maupun yang sedang berlangsung (UNDRR, 2017). Pengertian ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 yang dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sementara itu, Crockett & Leumas (2024) mendefinisikan kesiapsiagaan bencana sebagai perencanaan dan tindakan pencegahan yang dilakukan secara praktis agar individu dapat merespons dan mengambil tindakan yang efektif saat bencana terjadi. Dengan demikian, kesiapsiagaan dapat dimaknai sebagai kapasitas yang mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sumber daya yang dipersiapkan sebelum bencana terjadi agar individu mampu melindungi diri, merespons secara efektif, mempercepat proses pemulihan, dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Kesiapsiagaan bencana berperan penting dalam menekan risiko sekaligus kerugian yang ditimbulkan bencana (Ma et al., 2021). Kajian ahli mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan terbukti mengurangi potensi kerugian hingga 13 kali lipat (U.S. Chamber of Commerce, 2024). Lebih lanjut, kesiapsiagaan turut meminimalisir dampak dari hilangnya pekerjaan, mengurangi evakuasi berkepanjangan, dan mempercepat proses pemulihan (U.S. Chamber of Commerce, 2024). Maka dari itu, kesiapsiagaan bencana seharusnya dipandang sebagai kebutuhan sekaligus kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap individu, terutama bagi masyarakat di wilayah yang rentan bencana seperti Jakarta.

Pemerintah Jakarta telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mengurangi dampak banjir. Secara struktural, langkah yang ditempuh meliputi pembangunan pompa air, revitalisasi waduk, pembangunan bendung kering seperti Bendungan Ciawi, dan proyek normalisasi Sungai Ciliwung (Al Hamasy, 2021; Izan, 2025; Primadita, 2025). Upaya tersebut dilengkapi dengan kerangka kebijakan, seperti Rencana Strategis BPBD DKI Jakarta 2018–2022 dan Pergub DKI Jakarta No. 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Banjir (Taryana, 2022; Umam et al., 2025). Dari sisi non-struktural, pemerintah juga menyusun pedoman mitigasi, membentuk desa tangguh bencana, serta menyelenggarakan edukasi, pelatihan, dan simulasi evakuasi bersama masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir (BNPB, 2025a). Lebih lanjut, pemerintah juga berinovasi dalam mengembangkan sistem peringatan dini yakni Jakarta Flood Early Warning System (J-FEWS) dan aplikasi digital seperti JakPantau dan JAKI, serta membangun *platform* Jakarta Smart City dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat (Taryana et al., 2022).

Walaupun berbagai upaya telah dikerahkan, realitas yang ada masih mengindikasikan bahwa kesiapsiagaan masyarakat Jakarta terhadap banjir terbilang rendah. Dari sisi rencana tanggap darurat, mayoritas keluarga belum memiliki skema evakuasi mandiri dan perlengkapan darurat yang jelas, sehingga respons

ketika banjir datang cenderung reaktif (Madjid et al., 2024). Kondisi ini juga diperkuat dari hasil laporan media Diveranta (2021) yang mengungkapkan bahwa warga di bantaran kali Jakarta belum menyiapkan rencana darurat meskipun kerap terdampak banjir dan cenderung tidak mempersiapkan diri menghadapi kondisi terburuk ketika curah hujan tinggi melanda. Selain itu, warga Jakarta yang tinggal di wilayah pesisir cenderung menganggap banjir sebagai kejadian yang normal, alih-alih merasa terancam meskipun sering menghadapi banjir yang tingginya melebihi dada (Takagi et al., 2021). Selaras dengan itu, hasil wawancara Putra (2025) pada warga di Bidara Cina, Jakarta Timur, menunjukkan bahwa mayoritas warga memilih bertahan di rumah walaupun banjir telah mencapai dua meter. Hal ini terjadi karena mereka sudah terbiasa menghadapi banjir, enggan untuk berpindah lokasi, dan lebih merasa khawatir terhadap risiko pencurian apabila rumah ditinggalkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi prabencana dan pascabencana juga cenderung minim. Program pemerintah seperti pembangunan polder, normalisasi sungai, dan pembuatan sumur resapan seringkali tidak diimbangi dengan keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan, melaporkan kerusakan, dan mengawasi pemanfaatan infrastruktur tersebut (Jelibsed et al., 2025). Akibatnya, banyak fasilitas mitigasi yang tidak berfungsi optimal atau cepat rusak. Penelitian Oktariza (2023) juga menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pascabencana masih rendah. Sebagian besar warga tidak berpartisipasi dalam pembangunan kembali fasilitas umum seperti posyandu atau perbaikan tanggul yang rusak akibat banjir, dan jarang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, karang taruna, maupun RT/RW setempat. Lebih lanjut, kebiasaan membuang sampah ke sungai serta mendirikan permukiman di bantaran kali semakin memperkuat gambaran rendahnya kesiapsiagaan bencana di Jakarta (Octaviani, 2016).

Studi sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kesiapsiagaan, mulai dari faktor kognitif, motivasional, sosial, hingga lingkungan (Ni et al., 2025). Meskipun faktor-faktor tersebut beragam dan saling berkaitan, literatur perilaku protektif menunjukkan bahwa proses kognitif memiliki peran penting sebagai titik awal psikologis yang mendorong tindakan kesiapsiagaan

(Paton, 2003). Dalam perspektif tersebut, kognisi dipahami sebagai variabel prekursor yang memicu proses pengambilan keputusan individu dalam konteks bencana. Sejalan dengan hal tersebut, Lee & Lemyre (2009) menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan hasil dari evaluasi kognitif dan afektif terhadap suatu ancaman. Artinya, sebelum individu memutuskan untuk bersiap, mereka terlebih dahulu memproses informasi bahaya tersebut secara internal untuk menilai tingkat keparahan dan kerentanan risiko. Dengan demikian, kesiapsiagaan bencana acapkali dikaitkan dengan cara individu memandang suatu risiko bencana.

Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2017), risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kehilangan jiwa, luka-luka, maupun kerusakan aset yang dapat dialami suatu komunitas dalam periode tertentu. Risiko ini ditentukan berdasarkan hasil kombinasi antara bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) yang dimiliki baik oleh individu maupun masyarakat. Namun demikian, di luar kerangka tersebut, masyarakat awam sering kali memaknai risiko secara intuitif, di mana risiko dinilai berdasarkan perasaan, emosi, dan pengalaman individu (Bradford et al., 2012). Sejalan dengan hal tersebut, Slovic et al. (2004) menjelaskan bahwa cara individu menilai risiko terbagi menjadi dua, yakni secara rasional (*cognitive component*) dan secara emosional (*affective component*). Perbedaan pengaruh kedua komponen ini yang membuat cara individu dalam memaknai suatu risiko dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemaknaan subjektif terhadap risiko inilah yang kemudian dikenal sebagai persepsi risiko.

Persepsi risiko adalah penilaian subjektif individu mengenai kemungkinan bahaya dan konsekuensi negatif dari suatu risiko (Lechowska, 2018). Penilaian ini bersifat mental dan dibentuk melalui proses kognitif dan afektif, sehingga dapat berbeda antarindividu (Hoorens, 2020). Hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana individu memaknai sosial dan personal yang dibentuk melalui pengalaman hidup, nilai-nilai pribadi, dan konteks sosial individu (Yong, 2017). Dengan demikian, persepsi risiko ialah cara individu memaknai suatu risiko yang dipengaruhi oleh proses kognitif dan emosional, serta dibentuk oleh pengalaman dan konteks sosial.

Di Jakarta, banjir kerap dimaknai oleh sebagian masyarakat sebagai kejadian rutin yang lazim terjadi. Misalnya, hasil penelitian Kamsar (2024) menunjukkan bahwa di Sunter Muara, banjir telah dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari akibat sudah terbiasa menghadapi banjir berulang. Hal tersebut membuat mereka tidak selalu memaknai banjir sebagai situasi yang darurat. Sejalan dengan itu, temuan Hendrawati & Sulandari (2023) menunjukkan bahwa banjir telah dianggap sebagai suatu hal yang normal terjadi sehingga sebagian besar masyarakat cenderung tidak merasa tidak takut atau khawatir akan banjir. Persepsi ini juga diperkuat oleh anggapan bahwa banjir hanya menimbulkan kerugian materi bukan ancaman keselamatan jiwa (Nastiti et al., 2021).

Di sisi lain, temuan menarik Setiadi (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang telah menyadari risiko banjir justru tidak terdorong untuk mengikuti tindakan adaptif, seperti ide hunian atau normalisasi sungai. Lebih lanjut, perilaku yang justru memperburuk risiko seperti ekstraksi air tanah tetap dilakukan meskipun masyarakat mengetahui dampaknya terhadap banjir (Takagi et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran akan risiko belum tentu dapat diterjemahkan ke dalam tindakan antisipatif yang nyata.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat mendorong individu untuk mengadopsi tindakan kesiapsiagaan. Sebab, individu yang memandang ancaman secara serius cenderung lebih termotivasi untuk mengambil tindakan pencegahan (Adibroto et al. 2019; Aksa & Sinulingga, 2022; Elum & Lawal, 2022; Anilan et al., 2024; Rana et al., 2020). Kendati demikian, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Misalnya, penelitian Domingues et al. (2021) menemukan hubungan negatif antara persepsi risiko dan kesiapsiagaan bencana, di mana semakin tinggi persepsi risiko maka semakin rendah kesiapsiagaannya. Sementara itu, temuan lain mengungkapkan bahwa persepsi risiko tidak memiliki hubungan langsung dengan kesiapsiagaan bencana, seperti hasil penelitian Dobre et al. (2025) yang menemukan bahwa pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana diperantarai oleh faktor sosial yakni norma subjektif. Inkonsistensi temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi risiko mungkin tidak secara langsung mendorong perilaku kesiapsiagaan, melainkan ada faktor psikologis lain yang menjembatannya.

Salah satu faktor yang diduga dapat menjembatani pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana adalah *disaster response self-efficacy* (DRSE). *Disaster response self-efficacy* (DRSE) merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan respons bencana tertentu (Hasan et al., 2024). Keyakinan ini mencakup penilaian bahwa individu mampu memulai, menjalankan, dan menyelesaikan perilaku protektif atau tindakan adaptif yang dibutuhkan selama situasi bencana (Adam et al., 2025; Hasan et al., 2024). Individu akan mengadopsi suatu tindakan apabila ia meyakini bahwa dirinya mampu merespons secara efektif ketika bencana terjadi (Goktepe, 2025).

Istilah DRSE berakar dari teori *self-efficacy* yang dikembangkan oleh Bandura (1977, dalam Li et al., 2017; 1982), yang mendefinisikan *self-efficacy* sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengorganisasi dan mengeksekusi tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam konteks bencana, *self-efficacy* berperan sebagai dasar motivasional yang mengubah niat menjadi suatu tindakan. Individu dengan *self-efficacy* tinggi meyakini bahwa tindakannya dapat menghasilkan hasil yang diharapkan, seperti keselamatan diri dan orang lain. Oleh karena itu, *self-efficacy* kerap diidentifikasi sebagai prediktor yang kuat dalam mendorong seseorang untuk mengadopsi perilaku protektif (Zhang et al., 2022; Grahani et al., 2025; Lubis et al., 2024; Bandura, 1997).

Protection Motivation Theory (PMT) merupakan salah satu kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan dinamika *disaster response self-efficacy*, persepsi risiko, dan kesiapsiagaan bencana. PMT adalah kerangka yang menjelaskan bahwa keputusan individu untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap ancaman dipengaruhi oleh dua proses kognitif utama, yaitu *threat appraisal* dan *coping appraisal* (Ben-Enukora et al., 2024). *Threat appraisal* mengacu pada penilaian individu terhadap tingkat keparahan ancaman, probabilitas terjadinya, serta kerentanan dirinya, yang dalam konteks ini dapat disepadankan dengan persepsi risiko. Sementara itu, *coping appraisal* mencakup penilaian terhadap efektivitas respons dan *self-efficacy* yakni keyakinan bahwa individu mampu menghadapi ancaman secara efektif, yang sepadan dengan konsep *disaster response self-efficacy* (Dobre, 2025). Menurut teori PMT, motivasi untuk mengambil tindakan perlindungan hanya muncul ketika ancaman dirasa nyata dan

individu merasa mampu menghadapinya (Tasantab et al., 2022). Oleh karenanya, persepsi risiko saja tidak cukup untuk mendorong kesiapsiagaan apabila tidak diiringi dengan kepercayaan diri bahwa dirinya bisa bertindak efektif. Hal ini semakin menguatkan dugaan peneliti bahwa *disaster response self-efficacy* berperan sebagai jalur psikologis penting yang menjembatani pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana.

Berangkat dari landasan teoritis tersebut, peneliti berasumsi bahwa *disaster response self-efficacy* berpotensi menjadi mediator dalam pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana. Ketika seseorang meyakini bahwa ia memiliki kontrol dan strategi untuk melindungi diri, persepsi risiko seharusnya dipandang sebagai tantangan yang dapat dihadapi alih-alih dipersepsikan sebagai ancaman yang menakutkan. Keyakinan ini memperkuat *disaster response self-efficacy* yang kemudian mendorong munculnya perilaku kesiapsiagaan. Pandangan ini sejalan dengan temuan Qiu et al. (2017) yang menyatakan bahwa persepsi ancaman dapat menstimulasi individu untuk menilai sejauh mana dirinya mampu menghadapi risiko tersebut. Ketika individu merasa rentan, mereka terdorong mengevaluasi kemampuan diri dalam merespons ancaman (Ameruddin et al., 2025). Persepsi risiko yang tinggi dapat meningkatkan *disaster response self-efficacy* apabila individu meyakini bahwa dirinya memiliki kontrol dan strategi perlindungan yang memadai (Poussin et al., 2015). Hal serupa diungkapkan oleh Setiadi (2025), yang menemukan bahwa kepercayaan diri berperan dalam menjelaskan bagaimana masyarakat merespons risiko banjir dapat diterjemahkan ke dalam strategi adaptasi. Sejalan dengan itu, Ameruddin et al. (2025) melalui kajian literatur menempatkan *self-efficacy* sebagai mekanisme psikologis yang memperantarai persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana. Dengan begitu, *disaster response self-efficacy* berpotensi sebagai mekanisme psikologis yang dapat menjembatani pengaruh persepsi risiko dengan kesiapsiagaan bencana.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak menelaah pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana, namun hasil yang ditemukan masih menunjukkan ketidakkonsistenan (Adibroto et al., 2018; Aksa & Sinulingga, 2022; Elum & Lawal, 2022; Anılan et al., 2024; Rana et al., 2020; Cai et al., 2023; Ameruddin et al., 2025). Sejumlah penelitian lain kemudian mencoba menjelaskan

hubungan tersebut dengan memasukkan variabel mediator atau moderator. Misalnya, penelitian Dobre et al. (2025) yang menemukan bahwa pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan dimediasi oleh faktor sosial berupa norma subjektif atau Marceron & Rohrbeck (2019) yang menemukan bahwa *self-efficacy* dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana. Di sisi lain, Ameruddin et al. (2025) melalui kajian literatur sistematis mengajukan kerangka konseptual yang menempatkan *self-efficacy* sebagai mekanisme psikologis internal yang menjembatani pengaruh persepsi risiko dan kesiapsiagaan bencana. Namun, kajian tersebut masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Selain itu, penelitian yang membahas *self-efficacy* umumnya hanya meneliti pengaruh *disaster response self-efficacy* terhadap kesiapsiagaan tanpa melibatkan persepsi risiko sebagai prediktor utama (Lubis et al., 2024; Wurjatmiko et al., 2018; Chasanah et al., 2025). Dengan demikian, penelitian yang secara spesifik menguji peran mediasi *disaster response self-efficacy* dalam pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menguji peran *disaster response self-efficacy* sebagai mediator yang menjembatani pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana secara empiris.

Penelitian ini membatasi partisipan pada masyarakat Jakarta berusia 17 hingga 45 tahun dengan pertimbangan bahwa rentang usia tersebut termasuk ke dalam kelompok dewasa awal menurut Levinson (1986), sehingga individu dianggap telah mampu mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks kebencanaan, karakteristik tersebut memungkinkan individu untuk menilai situasi dan mengambil keputusan secara mandiri dalam situasi darurat. Selain itu, fase ini juga menuntut individu untuk memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, sehingga diharapkan mampu menolong dirinya sendiri maupun kelompok rentan di sekitarnya. Lebih lanjut, Schaie (1994) mengungkapkan bahwa kelompok dewasa awal memiliki kapasitas kognitif dan pengambilan keputusan yang lebih matang dan relatif stabil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh persepsi risiko terhadap

kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir yang dimediasi oleh *disaster response self-efficacy*. Penelitian ini turut mengikutsertakan variabel kovariat berupa jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pengalaman banjir sebagai variabel yang dikontrol karena karakteristik demografis ditemukan dapat memengaruhi variabel kesiapsiagaan bencana (O'Neill et al., 2016; Anifahtun et al., 2025; Aprilia et al., 2023; Najafi et al., 2017). Maka dari itu, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir dengan memperhitungkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pengalaman banjir sebagai variabel kontrol.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat teridentifikasi adanya masalah sebagai berikut:

1. Banjir merupakan fenomena yang memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Jakarta termasuk ke dalam wilayah yang rentan terhadap banjir dan memiliki sejarah banjir besar yang panjang.
3. Risiko banjir di Jakarta diproyeksikan akan terus meningkat di masa mendatang sehingga memerlukan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
4. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana banjir terindikasi masih tergolong rendah.
5. Persepsi risiko bencana masyarakat terhadap banjir di Jakarta masih bervariasi dan cenderung belum disertai kesiapsiagaan yang memadai.
6. *Disaster Response Self-efficacy* diduga menjadi faktor yang menjembatani antara pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana banjir di Jakarta.
7. Penelitian empiris yang menguji DRSE sebagai mediator dalam pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana masih terbatas.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh pembahasan mengenai pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir yang dimediasi oleh *disaster response self-efficacy*. Selain itu, penelitian ini membatasi masalah dengan berfokus melibatkan masyarakat Jakarta berusia 17 – 45 tahun. Pembatasan masalah ini dilakukan agar pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu “Apakah terdapat pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir yang dimediasi oleh *disaster response self-efficacy*?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir yang dimediasi oleh *disaster response self-efficacy*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur dan kajian mengenai pengaruh persepsi risiko terhadap kesiapsiagaan bencana banjir, khususnya dengan menguji peran *disaster response self-efficacy* sebagai variabel mediator.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga kebencanaan dalam merancang kebijakan serta program

kesiapsiagaan bencana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan dalam pengembangan pendekatan kesiapsiagaan bencana.

